



Pengaruh Penerapan *Smart* ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0

Dito Aditia Darma Nasution^{1*}, Anggi Pratama Nasution¹, M Firza Alpi²

¹Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id, ²anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id, ³m.firzaalpi@umsu.ac.id

Abstrak

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sebuah negara terlebih saat ini dunia sedang menghadapi era disrupsi teknologi hingga munculnya Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Smart* ASN terhadap pengelolaan keuangan negara di era disrupsi teknologi Indonesia 4.0. Sampel penelitian ini berjumlah 67 orang yang merupakan ASN pada Kementerian/Lembaga yang berdomisili di Kota Medan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian survey. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk analisis statistik dan model regresi telah diuji terlebih dahulu dalam uji asumsi klasik. Berdasarkan analisis deskriptif dan hasil uji statistik yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *smart* ASN berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: *Smart* ASN, Keuangan Negara, Disrupsi, Informasi, Teknologi

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara telah mengalami reformasi kearah yang lebih baik, hal ini dibuktikan dengan terbitnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditandatangani oleh Presiden yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan SAP berbasis akrual per 1 Januari 2015 [1]. Penerapan SAP berbasis akrual menuntut seluruh kegiatan pengelolaan keuangan harus akuntabel dan transparan sehingga untuk mendukung hal tersebut pemerintah pusat dan daerah harus membuat pola kerja penganggaran ke era sistem informasi digital yaitu berbasis elektronik [2]. Era pengelolaan keuangan negara berbasis elektronik menuntut seluruh aktivitas pengelolaan keuangan negara dalam perencanaan dan penganggaran harus lebih transparan dan akuntabel sehingga untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu program/kegiatan yang dapat menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kualitas yang tinggi guna mempermudah terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel tersebut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sebuah negara. Terlebih saat ini dunia sedang menghadapi era disrupsi teknologi hingga munculnya Revolusi Industri 4.0 [3]. Terkait dengan hal tersebut agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di era Revolusi Industri 4.0 Pemerintah telah merancang *road map* program *Smart* ASN yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2024.

Dalam hal pengembangan kompetensi dan kesejahteraan ASN, pemerintah memiliki cita-cita menyiapkan *Smart* ASN di tahun 2024 dengan berbagai kriteria, yaitu harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami teknologi/informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, serta *entrepreneurship* [4]. Untuk mewujudkan *Smart* ASN 2024 tersebut, pemerintah harus mulai serius mempersiapkannya sejak dari tahapan perencanaan dan perekrutan melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena salah satu filosofi yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung agar berjalan dengan efektifnya konsep *Smart* ASN yaitu bahwa pegawai dipandang sebagai sebuah investasi bagi institusi, di mana jika karyawan atau pegawai tersebut dikelola dengan perencanaan yang baik dan lebih profesional, maka akan memberikan imbalan bagi institusi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar, dan kemungkinan pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien [5]. Tahap perencanaan dan perekrutan tersebut artinya mulai dari proses pendaftaran harus telah terintegrasi dan *online*, serta dilanjutkan sampai pada proses seleksi juga harus terkomputerisasi dan terbuka yang pada akhirnya akan bermuara pada ASN yang dihasilkan dari proses perekrutan tersebut memiliki kriteria *Smart* ASN yang berintegritas, berwawasan global, serta memahami teknologi/informasi dan bahasa asing. Pada prakteknya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dibuktikan dengan dibentuknya kelompok kerjasama multi stakeholder untuk melakukan rekrutmen ASN, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembuat kebijakan, kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai implementasi kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peneliti kebijakan dan pendidikan, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pengawas kebijakan. Kementerian PANRB juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang didalam nya terdapat para akademisi untuk penyusunan soal seleksi CPNS.

Selain dari tahap perencanaan dan perekrutan, upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan *Smart* ASN 2024 adalah melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dijelaskan bahwa P3K ini statusnya sudah diakui juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki hak-hak yang sama pula dengan PNS walaupun masih terdapat perbedaan yaitu dalam hal mendapatkan hak keuangan berupa gaji pensiun oleh negara. Walaupun demikian, hal tersebut masih bisa di tanggulangi pemerintah dengan mewajibkan para P3K untuk

mengasuransikan sebagian gaji nya untuk kesejahteraan di hari tua melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sehingga permasalahan tersebut dapat sedikit diminimalisasikan.

Upaya yang juga penting yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan perencanaan ASN yang mengacu pada *core business* instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dibangunnya aplikasi e-formasi pada *Command Center* Kementerian PANRB yang memiliki fungsi tidak hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan CPNS akan tetapi juga dapat mengetahui sebaran PNS, tren pensiun, dan anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai.

Pada era disrupsi yang suka ataupun tidak suka harus dihadapi ini, pemerintah harus terus melakukan penguatan pelayanan di berbagai bidang atau sektor strategis khususnya yaitu dalam pengelolaan keuangan negara demi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia menuju revolusi industri 4.0 sesuai dengan nawacita pemerintah pada poin yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik [6]. Seiring dengan telah berjalannya program dan nawacita pemerintah tersebut, kini telah bisa diukur bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Diketahui, ada perkembangan harapan hidup dari tahun 2013 yakni 70,4 menjadi 71,6 pada tahun 2017. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat yakni dari 68,31 pada tahun 2013 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Seiring itu, usia harapan hidup Indonesia mengalami peningkatan menjadi rata-rata 71. Dengan perincian yaitu laki-laki di usia 69 dan perempuan di usia 74 hal ini adalah merupakan dampak dari pembangunan berbagai bidang atau sektor strategis khususnya dalam bidang perekonomian dan pengelolaan keuangan negara [7].

Sementara itu, saat ini terdapat beberapa permasalahan pada sebagian SDM di Indonesia yang dirasa dapat menghambat tujuan negara pada sektor pengelolaan keuangan negara, yaitu adanya budaya jalan pintas untuk mencapai tujuan, pekerjaan yang asal jadi tanpa adanya perencanaan pengelolaan keuangan yang baik, dan adanya *mindset* ingin mendapatkan pelayanan bukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait keuangan negara secara akuntabel dan transparan guna meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan dengan baik dan peruntukannya telah diberikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat [8].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya harmonisasi regulasi, dan Menteri PANRB sebagai *leading sector* dalam pembinaan ASN harus jadi pelopor utama menerbitkan regulasi-regulasi untuk meminimalisir dan memecahkan masalah yang ada. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan dalam sektor SDM adalah dengan menyempurnakan dan mengevaluasi standar pelayanan, sebab *progres* pekerjaan yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus, namun tuntutan masyarakat akan jauh semakin besar. Selain itu juga para pimpinan instansi pemerintah harus terlibat aktif dalam proses lelang jabatan untuk menentukan jabatan-jabatan strategis di lingkungannya. Karena memang saat ini tidak hanya dibutuhkan SDM dengan kompetensi tinggi, melainkan juga yang berintegritas tinggi [9].

Perwujudan ASN yang berintegritas tinggi adalah bentuk *Smart ASN* dalam pengelolaan keuangan negara yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut karena dengan rendahnya integritas ASN akan memunculkan peluang terjadinya korupsi lebih besar. Ada tiga faktor yang dapat membuat korupsi terjadi yaitu sistem dalam pengelolaan keuangan yang lemah, nafsu/keinginan dan kebutuhan yang tidak terkontrol. Hal tersebut dapat diartikan bahwa memiliki keinginan dan kebutuhan boleh saja dimiliki akan tetapi harus dicari dengan cara yang baik dan sesuai aturan, itulah sebenarnya tujuan dari konsep *Smart ASN* dalam pengelolaan keuangan negara.

Tata kelola keuangan yang baik akan terwujud melalui program *Smart ASN* dan akan bermuara kepada peningkatan perekonomian negara melalui pelaporan keuangan yang berkualitas. Hal ini karena prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan [10]. Maka dari itu, semakin berjalan dengan efektif program *Smart ASN* maka diharapkan akan memperoleh manfaat, antara lain proses transaksi dan penyajian laporan lebih cepat, memiliki keakuratan dalam perhitungan, informasi keuangan lebih relevan, cepat, lengkap dan dapat di uji kebenarannya. Konsep *Smart ASN* dalam pengelolaan keuangan juga harus dilandaskan dengan azas keterbukaan (transparansi). Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara [11]. Maka berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan tersebut diperkirakan terdapat pengaruh penerapan *Smart ASN* terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0 yang masih harus dibuktikan pada penelitian ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif (*quantitative approach*). Bertujuan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan antar variabel yang diteliti. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory yaitu penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada ASN di 26 Kementerian/Lembaga yang berdomisili di Kota Medan, sejumlah 206 ASN.

Dalam penelitian ini unit analisis yang akan diteliti adalah Kementerian/Lembaga berdomisili di Kota Medan, sedangkan unit observasi adalah para ASN. Dengan demikian maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ASN pada Kementerian/Lembaga yang berdomisili di Kota Medan. penarikan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik penarikan sampel dari populasi menggunakan *Simple Random Sampling*. Jumlah sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin [12]:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Derajat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini (presisi sebesar : e = 10%)

Presisi adalah tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel yang menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah 5% - 10%, dalam penelitian ini presisi ditetapkan sebesar 10%. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 206, maka dengan rumus Slovin di atas ukuran sampel minimal sebagai berikut:

$$n = \frac{206}{1 + 206 (0,10)^2} = 67 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas maka jumlah sampel paling sedikit sebanyak 67 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu: (1) Penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan melakukan penelitian lapangan ini diharapkan dapat diperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari para ASN pada Kementerian/Lembaga yang berdomisili di Kota Medan, Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner: (2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi tentang konsep teoritis dari berbagai variabel yang diteliti, dengan mempelajari buku-buku teks, majalah, dan jurnal-jurnal yang dapat menunjang pembahasan terhadap masalah yang sedang diteliti serta analisis penelitian di lapangan. Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yakni variabel bebas (variabel independen), yaitu Penerapan *Smart* ASN dan variabel terikat atau variabel yang terpengaruh terhadap variabel bebas (variabel dependen) yaitu Pengelolaan Keuangan Negara.

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana, adalah metode statistik untuk menguji pengaruh satu variabel dependen terhadap variabel independen. Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + e \quad (3)$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Keuangan Negara;

α = Konstanta;

β_1 = Koefisien regresi;

X₁ = Penerapan *Smart* ASN;

e = *error term*

Sebelum dilakukan pengujian model persamaan regresi berganda di atas, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian distribusi data dan pengujian asumsi klasik. Pengujian-pengujian tersebut dilaksanakan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS 18. Untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel, maka hasil penelitian harus diinterpretasikan sesuai dengan data teori dan nalar. Interpretasi besarnya hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggunakan model sebagaimana terlihat dalam tabel 1

Tabel 1. Pedoman dalam menginterpretasikan koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000-0,199	Sangat rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Cukup
0,600-0,799	Tinggi
0,800-1,000	Sangat Tinggi

Sumber: [13]

2.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan analisis item untuk mengetahui validitas item pertanyaan yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment Pearson dengan tingkat kesalahan 5% atau dengan tingkat keyakinan 95%.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konstan dari waktu ke waktu. Untuk menguji tingkat realibilitas konstruk dalam penelitian ini digunakan teknik uji *Cronbach Alpha*. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan menggunakan *One Shot* atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk menghitung reliabilitas pada SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 [13]. Jika *Conbach Alpha* < 0,70 hal ini mengindikasikan ada beberapa responden yang menjawab tidak konsisten, sehingga untuk meningkatkan alpha responden tersebut harus dibuang. Untuk menentukan keeratan hubungan setelah didapat alpha bisa menggunakan kriteria, sebagai berikut:

- Kurang dari 0,20 : Hubungan sangat kecil dan bisa diabaikan
- 0,20 < 0,40 : Hubungan kecil (tidak erat)
- 0,40 < 0,70 : Hubungan cukup erat
- 0,70 < 0,90 : Hubungan erat
- 0,90 < 1,00 : Hubungan sangat erat
- 1,00 : Hubungan sempurna

2.3 Uji Distribusi Data dan Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas [14]. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas stau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal [15]. Pengujian asumsi normalitas data dilakukan untuk menentukan alat uji statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Dengan menggunakan uji *kolmogorof-Smirnov*, yang pada dasarnya merupakan *test of goodness of filt* atau uji keselarasan. Uji normalitas dilakukan terhadap suatu data dikatakan terdistribusi normal jika assymp sig > alpha.

2.4 Langkah-langkah Pengujian Hipotesis

Langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut :

- Merumuskan hipotesis statistik : Jika hasil pengujian menolak H_0 , berarti $\beta > 0$. Agar dapat diketahui β yang secara benar mempengaruhi variabel endogenus maka perlu dilakukan pengujian secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut : $H_0 : \beta = 0$, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y $H_a : \beta > 0$, artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y.
- Melakukan pengujian statistik : Alat uji statistik yang digunakan untuk pengujian secara parsial yaitu Uji-t. Besarnya thitung, dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se \beta_i} \quad (4)$$

Dimana:

- β_i = Parameter/koeffisien ke-i
 $Se \beta_i$ = Standard error parameter/koeffisien ke-i
i = 1,2,3

- Menentukan Kriteria Pengujian : Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: H_0 tidak ditolak H_1 ditolak. t_{tabel} ta : k (n-k-i) diperoleh dari tabel distribusi t-Student pada taraf kesalahan α untuk satu pihak dan derajat bebas $V = n - k - 1$ Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_1 tidak ditolak H_0 ditolak. t_{tabel} ta : k (n-k-i) diperoleh dari tabel distribusi t-Student pada taraf kesalahan α untuk satu pihak dan derajat bebas $V = n - k - 1$. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu [14]. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Koefisien determinasi (R^2) diartikan sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil perkiraan terhadap data hasil penelitian. Kelemahan utama penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model, sehingga banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 kuesioner yang dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2. Pengelompokan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	37	55,2%
Wanita	30	44,8%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yakni mencapai persentase 55,2% dan sisanya sebesar 44,8% berjenis kelamin wanita. Sebaran kuesioner yang tidak merata dalam hal jenis kelamin dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap data hasil penelitian yang akan diolah. Hal ini telah diuji melalui uji realibilitas yang dilakukan secara terpisah. Bagi yang berjenis kelamin pria menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,706 sehingga hasil yang ditunjukkan reliabel, sedangkan untuk yang berjenis kelamin wanita memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,610 dan masih dikatakan reliabel juga. Selain itu jumlah presentase pria dan wanita yang tidak begitu signifikan, melihat hanya ada perbedaan 7,6% antara total jenis kelamin wanita dan pria.

Tabel 3. Pengelompokan Jabatan Responden

Jabatan	Frekuensi	Persentase
Eselon II	3	4,4%
Eselon III	8	11,9%
Eselon IV	21	31,4%
Staf	35	52,3%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar jabatan ASN yang menjadi responden adalah Staf dengan persentase sebanyak 52,3%, Eselon IV 31,4% dan persentase paling kecil adalah jabatan Eselon II sebanyak 4,4%.

Tabel 4. Pendidikan Terakhir Responden

Jabatan	Frekuensi	Persentase
SMA/SMK	-	-
D3	9	13,4%
S1	55	82,1%
S2	3	4,5%
S3	-	-
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1 dengan persentase sebesar 82,1% dan tidak sedikit juga responden yang memiliki pendidikan terakhir D3 sebesar 13,4%, walaupun demikian terdapat juga responden memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 4,5%.

Tabel 5. Lama Bekerja Responden

Jabatan	Frekuensi	Persentase
1 – 2 Tahun	27	40,2%
2 – 5 Tahun	19	28,5%
>5 Tahun	21	31,3%
Total	67	100%

Sumber: Data diolah, 2019

Dari data lama bekerja responden pada tabel 5, sebagian besar responden bekerja kurang dari 2 tahun dengan persentase 40,2%. Sisanya yang bekerja antara 2 sampai 5 tahun sebesar 28,5% dan kisaran 5 tahun keatas dan bisa dibilang sudah mempunyai pengalaman yang cukup sebagai ASN sebesar 31,3%.

3.2 Uji Kualitas Data

3.2.1 Uji Validitas

Untuk mengetahui dan menilai kevalidan setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dapat dilihat dari nilai *corrected item-total Correlation* dari setiap butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai *r*-hitung yang terdapat pada kolom *corrected item-total correlation* lebih besar ($>$) dari *r*-tabel.

1. Uji Validitas Variabel Penerapan Smart ASN (PSASN)

Dengan menggunakan jumlah sampel 67 responden, maka nilai responden dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama pada variabel Penerapan Smart ASN (PSASN). Jadi untuk variabel PSASN, $df = 67 - 2 = 65$, maka nilai *r*-tabel = 0,273. Butir pertanyaan dikatakan valid jika *r*-hitung yang merupakan nilai dari *corrected item-total correlation* lebih besar dari *r*-tabel (*r*-hitung $>$ *r*-tabel). Analisa output dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 6:

Tabel 6. Uji Validitas PSASN

	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	0,721	0,273	Valid
2	0,681	0,273	Valid
3	0,860	0,273	Valid
4	0,801	0,273	Valid
5	0,800	0,273	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Jadi berdasarkan uji validitas, kelima butir pertanyaan untuk variabel Penerapan Smart ASN (PSASN) telah lulus uji validitas.

2. Uji Validitas variabel Pengelolaan Keuangan Negara (PKN)

Dengan menggunakan jumlah sampel 67 responden, untuk variabel Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), $df = 67 - 2 = 65$, maka nilai *r* tabel = 0,273. Butir pertanyaan dikatakan valid jika *r*-hitung yang merupakan nilai dari *corrected item-total correlation* lebih besar dari *r*-tabel (*r*-hitung $>$ *r*-tabel). Analisa output dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Validitas PKN

	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	0,810	0,273	Valid
2	0,793	0,273	Valid
3	0,817	0,273	Valid
4	0,705	0,273	Valid
5	0,794	0,273	Valid
6	0,744	0,273	Valid
7	0,742	0,273	Valid
8	0,869	0,273	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Jadi berdasarkan uji validitas, kedelapan butir pertanyaan untuk variabel Pengelolaan Keuangan Negara (PKN) telah lulus uji validitas.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika menilai alpha lebih besar dari 0.06 ($\alpha > 0.60$). Untuk melihat hasil uji realibilitas perlu dilihat pada tabel *reability statistic* akan terlihat nilai alpha pada kolom *conbach's alpha*. Analisa output dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Reliabilitas

Pertanyaan Variabel	Cronba ch's Alpha	Standar	Keterangan
PSASN dan PKN	0,662	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai alpha dari variabel PSASN dan PKN lebih dari 0,60 yang merupakan nilai standar. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.3 Uji Regresi Linier Sederhana

3.3.1 Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas data dilakukan untuk menentukan alat uji statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Asumsi normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogorof-Smirnov, yang pada dasarnya merupakan *test of goodness of fit* atau uji keselarasan. Uji normalitas dilakukan terhadap suatu data dikatakan terdistribusi normal jika $assympt sig > \alpha$. Dalam penelitian ini $\alpha = 5\%$ (0,05).

Tabel 9. Uji Normalitas

Var	K-SZ	Assymp. Sig (2 tailed)	@	Keterangan
PSASN	1,236	0,094	0,05	Berdistribusi Normal
PKN	0,962	0,313	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2019

3.3.2 Heteroskedastisitas

Uji asumsi yang terakhir adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas didefinisikan oleh Gujarati (1995) sebagai suatu situasi tidak konstannya variance. Deteksi atas kondisi ini dilakukan dengan membuat variabel residual yang dihasilkan dari regresi understandardized. Kemudian dilakukan uji dengan metoda Glejzer. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error		Beta		
(Constant)	-1.137	3.488			326	.746
Jumlah PKN	.041	.124		.046	.328	.744

Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Data diolah, 2019

Dalam tabel 10 tersebut nilai sig untuk setiap variable independennya $> 0,05$ (α), yaitu 0,744. Nilai tersebut sangat signifikan. Dengan demikian tidak ada ditemukan heteroskedastisitas.

3.3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau disebut uji regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen

1. Uji Hipotesis (t-Test)

Hipotesis menguji pengaruh Penerapan *Smart ASN* terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Hipotesis dibawah ini peneliti akan menguji apakah Penerapan *Smart ASN* akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil uji t untuk menggunakan SPSS 16.0 dengan signifikansi level $\alpha = 5\%$ (uji dua arah/two-tailed) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Uji Uji Hipotesis (t-Test)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error		Beta		
Jumlah	-,453	.0198		-0,287	2,288	0,027

Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Negara

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil dari uji t tergantung dari nilai signifikannya, karena nilai signifikan 0,027 atau 2,7% lebih kecil dari signifikan level $\alpha = 5\%$ atau $p\text{-value } 2,7\% < \alpha = 5\%$ (uji dua arah/two-tailed) maka, artinya Penerapan *Smart ASN* berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Negara.

4. KESIMPULAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sebuah negara terlebih saat ini dunia sedang menghadapi era disrupsi teknologi hingga munculnya Revolusi Industri 4.0. ASN merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan negara karena laporan keuangan pemerintah disusun oleh ASN yang memiliki tupoksi penyusunan dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut tentunya dapat didukung oleh



program *Smart ASN* yaitu ASN harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami teknologi/informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, serta *entrepreneurship*.

Berdasarkan Analisa Deskriptif dan Hasil uji statistik yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Smart ASN* berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yaitu 67 responden dan dilakukan pada Kementerian/Lembaga yang berada di kota Medan. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan, serta keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: (1) Untuk lebih meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara, maka sebaiknya Kementerian/Lembaga mengikutsertakan ASN mengikuti pelatihan pembangunan karakter dan pencegahan korupsi/kecurangan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (2) Peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian selanjutnya tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga di Kota Medan saja, tetapi disarankan untuk lebih memperluas subjek penelitiannya seperti Kementerian/Lembaga yang berada di Provinsi Sumatera Utara bahkan skala nasional yaitu pada lingkup Kementerian/Lembaga di Indonesia.

REFERENCES

- [1] D. A. D. Nasution, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akual dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," 2016.
- [2] D. A. D. Nst, "Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akual Pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)," *Loyal. J. Pengabdian. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 41–50, 2019.
- [3] A. K. Wardani, "Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi," *Dinamika*, vol. 6, no. 2, pp. 30–35, 2019.
- [4] R. M. D. Putra, "Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya)," *Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 1–13, 2018.
- [5] D. A. D. Nasution, "Pengaruh Remunerasi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan," *J. Akunt. dan Bisnis J. Progr. Stud. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 71–80, 2019.
- [6] H. Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental," *JATI UNIK*, vol. 1, no. 2, pp. 102–110, 2017.
- [7] Iskandar, S. Xu, and G. O'Donovan, "Revolusi Industri 4.0 dalam Pengelolaan Kas Negara: Pemodelan Prakiraan Kas Negara Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan," in *Simposium Nasional Keuangan Negara 2018*, 2018, pp. 821–845.
- [8] S. Haryono, "Re-Orientasi Pengembangan SDM Era Digital pada Revolusi Industri 4.0," in *The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018*, 2018, pp. 1–15.
- [9] A. A. Wahbi, S. Hapsari, and F. Hidayat, "Urgensi Literasi Ekonomi pada Era Industri 4.0: Studi Naratif di Kalangan Guru SMP Negeri Kota Tangerang Selatan," in *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, 2018, pp. 302–308.
- [10] D. A. D. Nasution, "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah," *J. Akunt. Bisnis dan Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 30–43, 2019.
- [11] D. A. D. Nasution, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah," *J. Stud. Akunt. Keuang.*, vol. 2, no. 3, pp. 149–162, 2018.
- [12] C. Dietmaier, "Deskriptive Statistik," in *Mathematik für Wirtschaftsingenieure*, 2017.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2016.
- [14] I. Ghazali, *Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. 2016.
- [15] I. Ghazali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang, 2011.